



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DUMAI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAISAL
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 204317

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/204 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. Tanah Seluas 3813 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 500.000.000		
5. Tanah Seluas 11291 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , WARISAN Rp. 2.000.000.000		
6. Tanah Seluas 296 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	210.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. MOTOR, ECGO 5 A/T ECGO BIKE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	65.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.929.711.554



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.405.511.554

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.405.511.554

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.